

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

2008-2012

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Muhammad Yudha Pangaribowo

Nomor Mahasiswa : 09313003

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2015

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
2008-2012
SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Prodi Ilmu ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Yudha Pangaribowo
Nomor Mahasiswa : 09313003
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam pedoman penulisan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku”.

Yogyakarta, November 2014



Muhammad Yudha Pangaribowo

PENGESAHAN

**Analisis Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 2008-2012**

Nama : Muhammad Yudha Pangaribowo

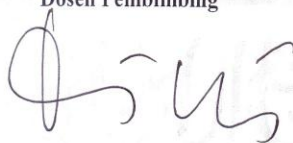
Nomor Mahasiswa : 09313003

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Oktober 2014

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Diana Wijayanti., SE., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008-2012**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD YUDHA PANGARIBOWO**

Nomor Mahasiswa : **09313003**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 22 Desember 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

Penguji : Drs. Suharto, M.Si

Drs. Sahabudin Sidiq, MA



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

**TIDAK ADA KEKUATAN YANG LEBIH BESAR SELAIN
KEKUATAN ALLAH SWT**

BADAI PASTI BERLALU

**TIADA DOA YANG LEBIH INDAH, SELAIN DOA AGAR
SEKRIPSI INI CEPAT SELESAI**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya skripsi ini
dapat diselesaikan.*

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Terima kasih atas segala cinta dan kasih,

Kepercayaan dan kesabaran serta doa yang tulus.

*Kupersembahkan karya ini kepada seluruh orang yang telah hadir dalam
kehidupanku yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam hidupku
dan orang yang kucintai yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan
skripsi ini*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI PROROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TAHUN 2008-2012” dapat penulis selesaikan.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Kedua orangtua, saudaraku dan Elyda Ratna Wijaya yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu mendoakan.
2. Ibu Diana Wijayanti., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik dalam memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini.
3. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Teman-teman IE 2009. Imam, Laksono, Ulil. Semoga persaudaraan akan tetap sampai tua.
5. Bang Budi dan keluarga besar Ilmu Ekonomi. IE bersatu tak bisa dikalahkan.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta , November 2014

Muhammad Yudha Pangaribowo

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman MOTTO	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Halaman Abstraksi	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Teori <i>Human Capital</i>	17

2.2.2. Teori Pertumbuhan Endogen	17
2.2.3. Pengertian Pendidikan	18
2.2.4. Ketimpangan Pendidikan	19
2.2.5. Teori Pembangunan Manusia	20
2.2.6. Ketimpangan Antar Daerah	21
2.3. Kerangka Penelitian	22
2.3.1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendidikan	22
2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dengan Ketimpangan Pendidikan	23
2.3.3. Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Ketimpangan Pendidikan	24
2.3.4. Hubungan Laju Pertumbuhan PDRB dengan Ketimpangan Pendidikan	25
2.4. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis dan Sumber Data	27
3.2. Definisi Operasional	28
3.2.1. Ketimpangan Pendidikan	28
3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (X1)	28
3.2.3. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (X2)	29
3.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X3)	29
3.2.5. Laju Pertumbuhan PDRB (X4)	30

3.3.	Metode Pengumpulan Data	30
3.4.	Alat Analisis	31
3.4.1.	Mengukur Ketimpangan Pendidikan dengan Gini Ratio	31
3.4.2.	Regresi Data Panel	32
3.5.	Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data	34
3.6.	Pengujian Hipotesis	35
3.6.1.	Uji T	35
3.6.2.	Uji F	36
3.6.3.	Koefisien Determinan (R^2)	37
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		38
4.1.	Deskripsi Data Penelitian	38
4.2.	Deskripsi Obyek Data Penelitian	38
4.2.1.	Ketimpangan Pendidikan	38
4.2.2.	Indeks Pembangunan Manusia	38
4.2.3.	Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan	39
4.2.4.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	39
4.2.5.	Laju Pertumbuhan PDRB	39
4.3.	Hasil Olah Ketimpangan Pendidikan	40
4.4.	Hasil Uji Model Regresi Panel	42
4.4.1.	Pemilihan Model Regresi	42
4.5.	Pengujian Hipotesis	46
4.5.1.	Uji T	46
4.5.2.	Uji F	47

4.5.3. Uji Koefisien Determinan (R^2)	48
4.6. Analisis Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel dependen	48
4.6.1. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendidikan	48
4.6.2. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendidikan	50
4.6.3. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Ketimpangan Pendidikan	51
4.6.4. Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Ketimpangan Pendidikan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran.....	56
Halaman Daftar Pustaka	58
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

1.1. Rata-rata Lama Sekolah.....	8
1.2. Persentase Penduduk Miskin	8
3.1. Kategori Tingkat Sekolah	32
4.1. Ketimpangan Pendidikan	40
4.2. Hasil Uji <i>Chow</i>	42
4.3. Hasil Uji <i>Hausman</i>	43
4.4. Hasil Regresi <i>Fixed Effect</i>	44
4.5. Tabel <i>Intersep</i>	45
4.5. Tabel Pengujian Hipotesis	46
4.6. Hasil Uji <i>f</i>	47
4.7. Hasil Uji R^2	48

DAFTAR DIAGRAM

1.1. Angka Partisipasi Kasar	7
4.1. Ketimpangan Pendidikan	41

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perhitungan indeks gini dan analisis regresi data panel dengan menggunakan regresi *fixed effect*. Hasil analisis dari ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui bahwa ketimpangan pendidikan yang ada di D.I. Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah dengan kisaran angka gini 0,2-0,35. Selama tahun 2008-2012 sempat terjadi pergeseran ketimpangan tertinggi dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Kulon Progo. Kemudian analisis hasil yang dilakukan dengan regresi data panel diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel ketimpangan pendidikan, kemudahan variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ketimpangan pendidikan. Sedangkan Variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi variabel Ketimpangan pendidikan.

Kata Kunci : Ketimpangan pendidikan, Gini Pendidikan, Data Panel.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi, yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga meliputi persoalan distribusi pendapatan dan sosial masyarakat. Keadaan distribusi pendapatan dan sosial suatu masyarakat akan mencerminkan bagaimana kualitas pembangunan manusia di dalam sebuah negara. Kualitas pembangunan manusia diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Ukuran tersebut menyertakan beberapa variabel penting, yang tidak hanya berkaitan dengan variabel ekonomi semata, tetapi juga menyangkut pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan, bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting untuk pembangunan ekonomi. Pendidikan yang baik akan berdampak baik juga pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa negara yang masyarakatnya memiliki kesempatan menempuh pendidikan dan memiliki distribusi pendidikan yang baik, ternyata berdampak positif terhadap pembangunan ekonominya. Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar secara menyeluruh.

Tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Millenium Development Goals yang pada tujuan keduanya berisi tentang pencapaian pendidikan dasar secara universal. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara anggota PBB yang menyepakati mendeklarasikan delapan tujuan bersama di Millenium Development Goals (MDGs) tersebut. Mencapai pendidikan dasar, dengan target memastikan bahwa pada tahun 2015 setiap anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (Todaro dan Smith, 2006).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Disatu pihak, untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaatnya. Individu yang memperoleh pemasukan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Teori pertumbuhan Endogen, merupakan teori yang menempatkan pendidikan (*human investment*) sebagai variabel yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya ketersediaan modal dan ketersediaan sumber daya manusia saja, namun diperlukan knowledge yang baik yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia, untuk menjadikan sumber daya yang berkualitas, yang mampu melahirkan

inovasi guna pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara.

Galor dan Moav (2004) menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan modal manusia (*human capital*). Karena untuk mendapatkan keseimbangan sosial ekonomi pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan.

Di negara sedang berkembang, pada umumnya mempunyai persoalan pendidikan, tidak hanya menyangkut kualitas tetapi juga berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi/ketimpangan pendidikan. Terdapat sebagian daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif baik, biasa di wilayah perkotaan. Namun terdapat daerah yang ketimpangan pendidikannya relatif tinggi, biasanya di wilayah pedesaan.

Todaro dan Smith, (2006) menjelaskan, bahwa ketimpangan pendidikan akan memperburuk ketimpangan pendapatan, pelajar dari keluarga kaya berpeluang lebih besar melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan anak keluarga miskin yang berpenghasilan rendah karena pendidikan orang tua rendah, sulit meneruskan pendidikan. Sebaliknya ketimpangan pendapatan pada tahap berikutnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan, karena keterbatasan masyarakat miskin dalam mengalokasikan bagian pendapatannya untuk pendidikan.

Garmawandi (2012), menyebutkan bahwa ketimpangan sektor pendidikan terjadi dalam lima hal yang krusial, yaitu;

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai.
2. Pemberdayaan serta uji mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak berjalan baik.
3. Bentuk proses pelayanan pendidikan di sekolah dan di kelas terhadap peserta didik tidak maksimal.
4. Standar pengelolaan anggaran dan keuangan sekolah yang tidak akuntabel dan transparan.
5. Rendahnya peran serta secara partisipatif masyarakat dan stakeholder terhadap pendidikan.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa persoalan ketimpangan pendidikan ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dibidang anggaran. Seberapa besar anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang pendidikan, termasuk bagaimana distribusi anggaran juga menjadi hal yang cukup krusial dalam terjadinya ketimpangan pendidikan. Selain itu adanya ketimpangan pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan. Pada daerah yang ketimpangan pendapatannya tinggi, maka akan berdampak pada ketimpangan pendidikan yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang tingkat ketimpangan pendidikannya tinggi biasanya banyak terjadi di daerah yang mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan tinggi. Todaro dan Smith (2006:463),

menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan akan memperburuk ketimpangan pendidikan.

Easterly (2004) menemukan bahwa ketimpangan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Secara ekonomi, pendidikan erat kaitannya dengan mobilitas social dan politik. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang mempunyai kemampuan yang lebih baik di dalam kemampuannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik pula. Sebaliknya dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, pada tahap berikutnya akan dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih.

Di Indonesia, UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak meningkatkan pendidikan sepanjang hayat maka pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar merupakan dasar pemerintah untuk melakukan pembangunan pendidikan. Perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi berdampak pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Tidak hanya di bidang ekonomi dan politik akan tetapi mencakup semua bidang di seluruh kehidupan bangsa Indonesia termasuk didalamnya bidang pendidikan.

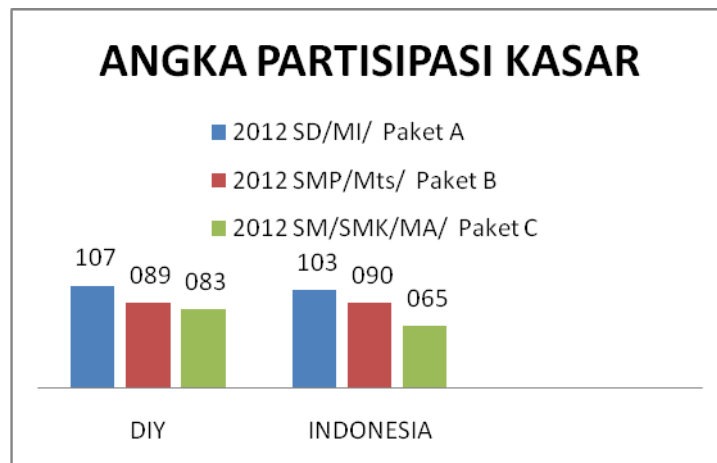
Perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi berdampak pada munculnya kebijakan pemerintah untuk desentralisasi pemerintahan atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa desentralisasi pendidikan terjadi karena adanya desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah. Dyer dan Rose (2005) dalam Kemdiknas (2011) mengatakan bahwa “desentralisasi pendidikan dinyatakan terkait dengan pergantian lokasi yang menyelenggarakan pemerintahan, pada umumnya dipahami sebagai pelibatan redistribusi kekuasaan dan kewenangan politik, sumber serta tanggung jawab dan fungsi-fungsi administratif”. Artinya bahwa desentralisasi pendidikan terjadi tidak lepas dari adanya desentralisasi pemerintahan. Adanya desentralisasi pendidikan diharapkan akan mampu menciptakan distribusi pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya ketimpangan pendidikan akan semakin mengecil.

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat sebutan sebagai kota pelajar, dapat dilihat bagaimana capaian pemerataan jenjang pendidikan. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa APK untuk jenjang pendidikan SMP dan sederajat adalah 89% namun pada APK untuk jenjang pendidikan SMA dan sederajat adalah 83%. Ini berarti adanya penurunan partisipasi sekolah dari SMP ke SMA sebesar 6% dan itu berarti pada tingkat sekolah SMP dan yang sederajat terdapat anak usia pendidikan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (lihat diagram 1.1)

Diagram Data 1.1

Angka partisipasi kasar jenjang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012



Sumber, BPS D.I Yogyakarta.

Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, pada tahun 2012, Gunung Kidul merupakan Kabupaten di Provinsi DIY yang memiliki rata-rata paling rendah dengan tahun lama sekolah sebesar 7,7 tahun, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo dengan tahun lama sekolah sebesar 8,95 tahun. Ini berarti untuk Kabupaten Gunung Kidul untuk rata-rata penduduk yang bersekolah hanya pada jenjang SD dan tidak tamat SMP. Berarti untuk program belajar 9 tahun masih belum dapat terpenuhi di beberapa kabupaten walaupun secara rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan rata-rata 9,21 tahun (lihat tabel 1.1)

Tabel data 1.1.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2012

Kabupaten	Tahun		
	2010	2011	2012
Kulon Progo	8.20	8.37	8.37
Bantul	8.82	8.92	8.95
Gunung Kidul	7.65	7.70	7.70
Sleman	10.30	10.51	10.52
Kota Yogyakarta	11.48	11.52	11.56
D I Yogyakarta	9.07	9.20	9.21

Sumber, BPS berbagai Terbitan.

Dari tabel tersebut diatas, tampak adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah tersebut. Tabel 1.2. Menjelaskan bagaimana kondisi kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel Data 1.2.

Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KP	BTL	GK	SLM	YK
2008	26,85	18,54	25,96	12,34	10,81
2009	24,65	17,64	24,44	11,45	10,05
2010	23,2	16,09	22,05	10,7	9,75
2011	23,63	17,28	23,03	10,61	9,62
2012	23,32	16,97	22,72	10,44	9,38

Sumber BPS, berbagai edisi

Tabel diatas menjelaskan tentang penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2012 berada pada Kabupaten Kulon

Progo sebesar 23,32% sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada pada Kota Yogyakarta.

Dari hal tersebut diatas, menarik untuk diteliti tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Kabupaten/Kota di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di dalam APBD terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah di sesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendidikan yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di dalam APBD terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2. Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah pusat, sebagai pertimbangan pemerintah dalam menetapkan dan mengkaji sistem pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai pertimbangan dalam mengatur alokasi dana untuk pendidikan.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan terkait ketimpangan pendidikan di periode yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab (bagian pokok) skripsi dan disusun sistematis. Kerangka skripsi penelitian Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2012 dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini lebih menekankan mengapa peneliti tertarik dengan judul penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian pustaka, berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. Sedangkan

landasan teori, berisi tentang teori-teori apasaja yang terkait dengan pembuatan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis-jenis data dan cara pengumpulan data. Jika menggunakan data primer maka harus dijelaskan metode pengambilan data sedangkan untuk menggunakan data sekunder maka harus disebutkan sumbernya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan memperlihatkan hasil regres data dari model yang dilakukan. Dari hasil regresi tersebut peneliti menganalisis hasil yang didapat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan saran dari hasil penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan dan saran yang peneliti buat merupakan gambaran tentang hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Muhammad Ja'far Bustomi (2002), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indeks gini pendidikan. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lain indeks gini pendidikan, angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, gender gap dan ketimpangan pendapatan (gini ratio). Dengan menggunakan data panel tahun 2007-2010, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan wilayah kabupaten selalu lebih tinggi daripada wilayah kota. Untuk faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan, gender gap, angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

Astuti Rahayu (2003), melakukan penelitian tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia tahun 1975-2000, dengan menggunakan data panel. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah rata-rata tahun sekolah, PDRB perkapita, gender gap sebagai variabel independennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di beberapa provinsi di Indonesia telah menurun selama 25

tahun terakhir, kecuali provinsi Irian Jaya yang justru mengalami kenaikan ketimpangan pendidikan. Selain itu, juga ditemukan adanya pola yang nyata dengan hubungan variabel yang berkebalikan (negatif) antara ketimpangan pendidikan yang diukur dengan indeks gini pendidikan dan rata-rata sekolah. Hal ini mengimplikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pencapaian sekolah pendidikan yang tinggi, paling mungkin mencapai pemerataan pendidikan daripada provinsi dengan tingkat pencapaian pendidikan yang rendah.

Ekber Tomul (2009), menjelaskan hubungan antara ketimpangan pendidikan di Turki dengan rata-rata lama menempuh pendidikan (sekolah). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan pendidikan di Turki selama periode waktu tahun 1975-2000. Terdapat hubungan yang negatif antara rata-rata lama menempuh pendidikan dengan ketimpangan pendidikan yang diukur dengan indeks gini pendidikan dan terdapat hubungan yang positif antara peningkatan rata-rata lama menempuh pendidikan dengan ketimpangan pendidikan.

Salwa Trabelsi (2013), melakukan penelitian tentang hubungan antara rata-rata lama pendidikan (bersekolah) dengan ketimpangan pendidikan di Tunisia selama tahun 1975-2004. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan di seluruh wilayah di Tunisia semakin meningkat diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendidikan. Selain itu juga ditemukan bahwa ketimpangan pendidikan banyak terjadi di wilayah pedesaan daripada di wilayah perkotaan.

Lessons (2012), melakukan penelitian tentang ketimpangan pendidikan di wilayah Mena (Timur Tengah dan Afrika Utara). Sampel yang digunakan adalah 15 negara MENA selama periode 1950-2010 menggunakan data panel. Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendidikan peneliti menggunakan *Kurva Kuznets*. Penelitian ini menghitung indeks gini pendidikan di 15 negara MENA menurut kriteria jenis kelamin, usia dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan yang eksplisit menurun untuk semua negara, baik untuk pria dan wanita dan untuk semua kelompok umur. Temuan juga telah menunjukkan bahwa distribusi pendidikan lebih tidak merata di negara-negara berpenghasilan menengah daripada di negara-negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2010 sementara pada tahun 1970 mengalami tingkatan yang sama antara negara menengah dan negara yang berpenghasilan tinggi. Pada tahap kedua penelitian adalah melakukan pengukuran ketimpangan pendidikan dengan *Kurva Kuznets*. Hasilnya menunjukkan bahwa *Kurva Kuznets* tergantung pada variabel yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan.

Thomas et al (2001) dengan menggunakan data 85 negara pada kurun waktu 1960-1990 mengukur ketimpangan dalam menciptakan pendidikan. metode yang digunakan ada 2 yaitu langsung dan tidak langsung untuk mengukur indeks gini berdasarkan rata-rata lama sekolah Yang menggambarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa selama tiga dekade ketimpangan mengalami

penurunan. Ketimpangan dalam pendidikan yang digambarkan dengan AYS menunjukkan hubungan negatif. Implikasinya bahwa Negara dengan capaian pendidikan penduduknya yang tinggi lebih merata mengenyam pendidikan dibandingkan dengan Negara dengan capaian pendidikan penduduknya rendah. diperoleh *Kurva Kuznets* jika digunakan standar deviasi pendidikan. Thomas et al (2001) juga menemukan bahwa kesenjangan gender berhubungan secara negatif terhadap ketimpangan pendidikan. peingkatkan PDRB per kapita berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pendidikan dan berpengaruh positif terhadap AYS angkatan kerja suatu daerah.

2.2. Landasan Teori

Ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) dan Thomas Malthus (1798) dan kemudian Frank Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Frank Knight (1944) dan Joseph Schumpeter (1934), memberikan unsur dasar dalam teori pertumbuhan ekonomi modern seperti pendekatan dasar perilaku persaingan dan keseimbangan dinamis, konsep *diminishing returns* dan hubungannya dengan akumulasi capital dan sumber daya manusia, dampak kemajuan teknologi dalam bentuk peningkatan spesialisasi tenaga kerja. (Barrow dan Martin,1995,9). Dari teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat penting didalam pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan teori pertumbuhan selanjutnya, tidak hanya menekankan pada jumlah

sumber daya manusia semata, namun menempatkan sumber daya sebagai *human capital*.

2.2.1. Teori *human capital*

Konsep modal Manusia (*Human Capital*) diperkenalkan oleh Theodore W, Schultz lewat pidatonya yang berjudul "*Investment In Human Capital*" di hadapan pada ekonom Amerika pada tahun 1960, kemudian di publikasikan melalui jurnal *American Economic Review*, pada maret 1961. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal modal fisik berupa alat-alat, mesin, dan peralatan produktif lainnya yang dirasa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Gagasan modal manusia yang diajukan oleh Schultz melalui "*Investment In Human Capital*" adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan, sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

2.2.2. Teori pertumbuhan endogen

Teori pertumbuhan yang baru menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis apa yang disebut pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem

yang mengatur proses produksi. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu kosekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang.

Model ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap peranan eksternalitas dalam penentuan tingkat hasil investasi permodalan. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu meningkatkan produktifitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil, model endogen ini mencoba menjelaskan terjadinya divregensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang. Dan meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.2.3. Pengertian pendidikan

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang berkompoten untuk kemajuan bangsa dan negara.

2.2.4. Ketimpangan pendidikan

Tujuan utama bangsa ini adalah mensejahterakan rakyat dengan pembangunan ekonomi. Untuk menciptakan pembangunan yang baik maka suatu daerah harus memiliki perekonomian yang baik pula. Maka dari itu, pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan untuk pemerataan pembangunan. Anggaran 20% yang disediakan dari APBD ternyata belum mampu meningkatkan angka pemerataan pendidikan di Negara ini. Menurut Soedijarto, pengamat pendidikan dari UNJ dalam Harian Seputar Indonesia (edisi Jum'at, 2 Desember 2011) mengatakan bahwa “pemerintah selama ini tidak pernah mengeluarkan anggaran pendidikan dengan kebutuhan yang jelas, pemerintah hanya berpikir linear. Anggaran yang disediakan untuk meningkatkan standar pendidikan secara tepat. Ini karena anggaran 20% dari APBD tidak digunakan untuk hal-hal untuk proses dan layanan pendidikan tetapi justru lebih pada pemenuhan kebutuhan struktural, infra struktur dan finansial kedinasan seperti pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas, pembangunan gedung-gedung. Hal ini seperti “pembagian kue” yang tidak dibagi secara bijaksana yang mengakibatkan

ketimpangan pendidikan yang terlihat dari perbedaan mutu, jumlah gedung, partisipasi masyarakat yang berbeda. Ketimpangan pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendidikan dapat dilihat melalui perhitungan koefisien gini. Koefisien gini secara tidak langsung adalah *Kurva Lorenz* yaitu, ratio daerah yang dibentuk oleh *Kurva Lorenz* dan garis 45 derajat dengan segi tiga dibawah garis 45 derajat.pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat diketahui dengan indeks gini pendidikan dari *Kurva Lorenz* pendidikan yaitu ratio antara proporsi komulatif populasi dan proporsi komulatif sekolah.

2.2.5. Teori pembangunan manusia

Paradikma baru pembangunan menurut kuncoro (2006) adalah pertumbuhan dengan distribusi pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*). Todaro (1989) menekankan 3 (tiga) nilai dasar pembanguanan, yaitu *life-sustenance* (kemampuan menyediakan kebutuhan dasar), *self-esteem* (kebutuhan untuk dihargai) dan *freedom* (kebebasan untuk memilih). Ini berarti setiap kelompok sosial yang paling lemah dapat memanfaatkan dari setiap program

pembangunan. Dengan kata lain konsep kebutuhan pokok harus dipandang sebagai dasar utama dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk menilai pembangunan manusia suatu daerah tidak hanya dilihat dari pendapatan domestik bruto (PDB). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengetahui tingkat pencapaian pembangunan manusia dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu indikator kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup, indikator pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tahun bersekolah, dan kemampuan konsumsi masyarakat yang diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.2.6. Ketimpangan antar daerah

Ketimpangan antar daerah terjadi karena tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan. Seperti yang di jelaskan oleh Meier (1995:7) bahwa suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolute tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak makin timpang.

Selain itu, ketimpangan antar daerah juga dapat terjadi kerena memiliki sumber daya yang baik. Tak hanya sumber daya yang baik saja, fasilitas yang dimiliki suatu daerah juga dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah. Kuncoro

(2004) mengatakan adanya kecenderungan peranan investor memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil merupakan salah satu faktor ketimpangan antar daerah.

Menurut Syafrizal (2008:127) ada dua alternatif sasaran yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan regional yaitu mewujudkan kemakmuran wilayah (*place prosperity*) dan kemakmuran masyarakat (*people prosperity*). Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah harus benar-benar tepat pada permasalahan mendasar yaitu pengentasan kemiskinan yang diikuti dengan pengentasan ketimpangan pembangunan.

2.3. Kerangka Penelitian

2.3.1. Hubungan indeks pembangunan manusia dengan ketimpangan pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup dan non fisik tercermin dari rata-rata lama sekolah dan daya konsumsi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk melihat kesejahteraan penduduk. IPM juga dapat mengukur apakah suatu daerah atau wilayah mencapai pemerataan pembangunan dengan 3 (tiga) indikator yang digunakannya yaitu

kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sedangkan ketimpangan pendidikan merupakan imbas dari ketidak merataan pembangunan seperti perbedaan jumlah gedung sekolah, partisipasi sekolah, mutu pendidikan, dana alokasi untuk pendidikan serta pendapatan dan kepadatan penduduk. Dapat dikatakan bahwa apabila manusia dapat hidup lama, maka memiliki kesempatan untuk bersekolah dan kemampuan daya beli yang tinggi akan mengurangi angka dari ketimpangan pendidikan dengan ikut berpartisipasi dalam melakukan pendidikan yang ada di daerah manusia itu tinggal. Dengan kata lain indeks pembangunan manusia mempengaruhi pemerataan pembangunan termasuk pemerataan pendidikan.

2.3.2. Hubungan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan ketimpangan pendidikan

Faktor mendasar untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia. Peningkatan mutu dan jaminan pendidikan untuk masyarakat miskin seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam program pembangunan daerah. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik dan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin merupakan bukti bahwa pemerintah benar-benar memfokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan angka partisipasi sekolah dengan serius.

Anggaran 20% yang disediakan Pemerintah daerah untuk pendidikan dari APBD merupakan dana yang dialokasikan untuk

meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui pembangunan struktural, infra struktur dan promosi program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat seharusnya dapat dioptimalkan. Dengan demikian diharapkan angka ketimpangan pendidikan akan menurun.

Adanya program pemerintah untuk masalah tuntas belajar 9 tahun dan subsidi dana BOS untuk masyarakat miskin merupakan bukti nyata kepada masyarakat tentang pengalokasian dana pemerintah. Dengan harapan tingkat ketimpangan pendidikan menjadi berkurang. Pada penelitian terdahulu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki hubungan yang negatif, dimana pada saat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dinaikan maka ketimpangan pendidikan dalam suatu daerah akan berkurang.

2.3.3. Hubungan ketimpangan pendapatan dengan ketimpangan pendidikan

Ketimpangan pendapatan merupakan jarak timpang antar pendapatan yang mayoritas tinggi dengan yang mayoritas rendah. Ketimpangan pendapatan dapat juga menjadi alat untuk mengukur tingkat konsumsi masyarakat. Untuk mendapatkan pendidikan manusia membutuhkan biaya. Dengan kata lain, salah satu penentu apakah orang/keluarga bisa bersekolah untuk mendapatkan

pendidikan atau tidak ditentukan oleh pendapatan dari orang/keluarga tersebut.

Sesuai yang dikemukakan Ja'far (2000), ketimpangan pendapatan mempunyai hubungan signifikan positif, yang artinya pada saat ketimpangan pendapatan suatu daerah tinggi maka ketimpangan pendidikan juga tinggi.

Seperti yang dikatakan Todaro dan Smith (2006:463) ketimpangan pendapatan memperburuk ketimpangan pendidikan. Anak dari keluarga yang kaya akan lebih mudah untuk bersekolah dibandingkan anak yang berasal dari keluarga miskin.

2.3.4. Hubungan laju pertumbuhan PDRB dengan ketimpangan pendidikan

Laju pertumbuhan PDRB merupakan suatu alat ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat melihat perkembangan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier,1989). Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai pemerataan yang baik, maka perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melihat PDRB dari wilayah tersebut.

Laju pertumbuhan PDRB yang baik akan meningkatkan Infra struktur dan struktural pembangunan termasuk pembangunan pendidikan dengan banyaknya gedung sekolah, akses jalan, kualitas

sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pertumbuhan PDRB yang baik juga dapat menguatkan daerah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengencangkan pendidikan terhadap masyarakat sehingga angka ketimpangan pendidikan akan menurun mendekati pemerataan.

2.4. Hipotesis

Ada beberapa faktor yang menurut peneliti mempengaruhi ketimpangan pendidikan yaitu indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, gini ratio, laju pertumbuhan ekonomi (PDRB).

1. Diduga angka indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.
2. Diduga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.
3. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.
4. Diduga laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.
5. Diduga secara bersama-sama variabel independen (indeks pembangunan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi) signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu prosedur atau cara yang disasari pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari atau mengetahui sesuatu untuk menjawab masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka yaitu dengan mencari data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber- sumber lainnya. Ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu,

1. Data Ketimpangan pendidikan menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 (Y)
2. Data indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 (X1)
3. Data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan menurut Kabupaten /Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 (X2)
4. Data ketimpangan pendapatan menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 (X3)
5. Data laju pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 (X4)

3.2. Definisi Oprasional

3.2.1. Ketimpangan Pendidikan (Y)

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan merupakan ratio antara proporsi kumulatif populasi dan proporsi kumulatif sekolah. Ketimpangan pendidikan yang rendah dapat menjadi acuan bahwa pembangunan ekonomi dalam hal pendidikan telah mencapai pemerataan.

3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS).

3.2.3. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X2)

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan digunakan untuk mengetahui alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pemerintah dalam melakukan pembangunan di bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diperlukan untuk mendorong kegiatan pendidikan. Makin tinggi biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan maka pembangunan di bidang pendidikan pun semakin merata. Dari pemerataan pembangunan pendidikan tersebut, ketimpangan pendidikan pun menurun.

3.2.4. Ketimpangan pendapatan (X3)

Ketimpangan pendapatan digunakan untuk mencari seberapa jauh perbedaan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh jarak pendapatan dalam masyarakat. Makin tinggi ketimpangan pendapatan maka makin jauh jarak antara kaya dan miskin sehingga ketimpangan pendidikan pun tinggi. Ini terjadi karena orang yang berpendapatan tinggi lebih memiliki peluang untuk melakukan pendidikan daripada orang miskin.

3.2.5. Laju Pertumbuhan PDRB (X4)

Laju Pertumbuhan PDRB didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (BPS). Laju pertumbuhan PDRB juga akan memperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Laju pertumbuhan PDRB yang tinggi memperlihatkan produksi barang dan jasa pada daerah tersebut juga tinggi. Produksi barang dan jasa yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan begitu juga tabungan, sehingga biaya untuk melakukan pendidikan pun akan terpenuhi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pustaka dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data dari literatur yang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan baik berupa dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Periode data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah tahun 2008-2012. Secara umum data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah.

3.4. Alat analisis data

3.4.1. mengukur ketimpangan pendidikan dengan *Gini ratio*

Untuk mengukur ketimpangan pendidikan, maka kita perlu menghitung dengan rumus :

$$E_{GI} = \left(\frac{1}{\mu}\right) \sum_{i=2}^n \sum_{j=i}^{i=1} p_i (y_i - y_j) p_j$$

Dimana:

E_{GI} = ketimpangan pendidikan

μ = rata-rata tahun pendidikan

p_i-p_j = proporsi populasi tingkat pencapaian sekolah yang pasti

y_i-y_j = tahun sekolah pada tingkat pencapaian yang berbeda

n = jumlah kategori tingkat pencapaian sekolah

Average Years of Shooling (AYS)

$$\mu = AYS = \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan $n = 6$ dengan kategori sebagai berikut: tidak sekolah/tidak tamat SD/MI, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/SMK, tamat Diploma I/II/III, tamat S1 dan S2.

Tabel Data 3.1.

Kategori Tingkat Sekolah

Kategori tingkat sekolah	Tahun
Tidak sekolah/Tidak tamat SD	0+3=3
Tamat SD	6
Tamat SMP	9
Tamat SMA	12
Tamat D1,D2,D3	14
Tamat S1,S2	16

Sumber : Data diolah.

Berarti rumus untuk mencari ketimpangan pendidikan adalah:

$$E = \frac{1}{\mu} [p_2(y_2 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_2)p_2 + \dots + p_6(y_6 - y_1)p_1 + p_6(y_6 - y_2)p_2 + p_6(y_6 - y_3)p_3 + p_6(y_6 - y_4)p_4 + p_6(y_6 - y_5)p_5]$$

3.4.2. Regresi Data Panel

Untuk menguji hipotesis yang ada, peneliti melakukannya dengan model regresi data panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 6*. Widarjono (2013) dalam bukunya mengatakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$I = 1, 2, \dots, N$$

$$t = 1, 2, \dots, N$$

dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N dan T = banyaknya data panel.

Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode. Yaitu:

1. *Common effect model*

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

2. *Fixed effect model*

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk

menjelaskan perbedaan intrsep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan least squares *dummy variables*(LSDV) dan ketika terdapat heteroskedistisitas menggunakan *fixed effect* dengan *cross section weight*. Model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \beta_6 D_{6it} + \beta_7 D_{7it} + \beta_8 D_{8it} + \dots + e_{it}$$

3. *Random effect model*

Metode ini memilih estimasi data panel dengan *residual* yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. namun demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel *random* atau *stokastik*. Model untuk *random effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_i$$

3.5. Pemilihan Model dalam Pengolahan Data

Ada 3 (tiga) tehnik estimasi dalam data panel , yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk mengetahui model mana yang akan digunakan maka perlu diadakan uji pemilihan model. Pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam pemilihan model. Yaitu:

1. *Chow Test* (uji F-statistik) ialah metode yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect*.
2. *Uji Hausman* ialah metode yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan model *random effect*.

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1. Uji Individu (Uji t)

Uji t adalah teknik uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Langkah-langkah menguji Hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika hipotesis positif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 > 0$$

2. Jika hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

3. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.
4. Jika nilai prob. T statistik ≥ 0.05 , maka H_0 gagal ditolak, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Sebaliknya, jika nilai prob. T-statistik $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.6.2. Uji Parsial (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh. Langkah-langkah uji f adalah sebagai berikut.

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Diartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Menemukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F.

4. Menentukan tingkat signifiakan (α) yaitu 5%.

5. Jika nilai Sig-F $\geq 0,05$, maka H_0 gagal ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

6. Sebaliknya jika Sig-F $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

3.6.3. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Kisaran nilai dari R^2 antara 0 dan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Begitu juga sebaliknya, seakin kecil nilai R^2 maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dan apabila nilai R^2 sama dengan nol maka tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Diskripsi data penelitian

Dalam penelitian ini, data yang penulis gunakan adalah data panel dari tahun 2008-2012 dengan obyek penelitian 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang penulis gunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Laju pertumbuhan PDRB. Sementara untuk variabel dependennya adalah Ketimpangan Pendidikan.

4.2. Diskripsi Obyek Data Penelitian

4.2.1. Ketimpangan Pendidikan

Data ini diperoleh dari hasil olahan yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode indeks gini. Data yang dibutuhkan untuk mencari data ketimpangan pendidikan adalah data rata-rata tahun sekolah dan jumlah penduduk 10 tahun keatas dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan tahun 2008-2012 di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut diperoleh dari buku-buku dengan judul terkait dalam perpustakaan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

4.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Data IPM dalam penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi DIY dari tahun

2008-2012 dalam satuan angka. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di Yogyakarta.

4.2.3. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan

Data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ini adalah data tentang alokasi dana belanja pemerintah dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY dari tahun 2008-2012 dalam satuan juta rupiah. Data ini diperoleh dari Rencana Anggaran Belanja Daerah (RABD) yang dikelola oleh Direktorat Jendral Perimbangan Daerah Provinsi DIY.

4.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Data ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan data indeks gini di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2008-2012 dalam satuan angka. Data tersebut diperoleh dari buku-buku dengan judul dalam perpustakaan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.5. Laju Pertumbuhan PDRB

Data laju pertumbuhan PDRB ini merupakan data untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Data yang diambil adalah data di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012 dengan satuan persen (%) data ini diperoleh dari Sistem Informasi dan Data Regional yang dikelola oleh BAPPENAS

(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) melalui media internet.

Data ini diperoleh dari hasil olahan yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode indeks gini. Data yang dibutuhkan untuk mencari data ketimpangan pendidikan adalah data rata-rata tahun sekolah dan jumlah penduduk 10 tahun keatas dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan tahun 2008-2012 di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut diperoleh dari buku-buku dengan judul terkait dalam perpustakaan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

4.3. Hasil Ketimpangan Pendidikan

Tabel Data 4.1.

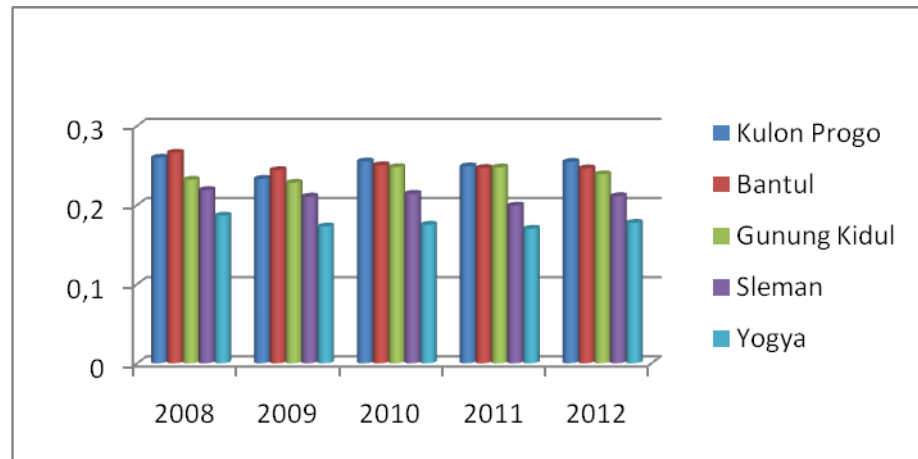
Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon Progo	0,259587	0,232991	0,254911	0,248768	0,254453
Bantul	0,265943	0,244081	0,250211	0,246631	0,246176
Gunung Kidul	0,231842	0,227992	0,247684	0,247392	0,238774
Sleman	0,21877	0,210556	0,214098	0,199141	0,211086
Yogya	0,186522	0,172769	0,175029	0,169994	0,177406

Sumber: data diolah *excel*

Diagram data 4.1.

Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta



Sumber, data diolah *excel*.

Dari tabel diagram 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah dimana hanya berkisar antara 0,2-0,35. Kota Yogya merupakan wilayah di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki tingkat ketimpangan pendidikan yang terkecil. Sedangkan untuk ketimpangan yang tertinggi selama 5 tahun dari tahun 2008-2012 adalah Kabupaten Bantul dengan angka 0,265943 yang terjadi pada tahun 2008. Akan tetapi terjadi pergeseran ketimpangan pendidikan tertinggi dari Kabupaten Bantul (2008-2009) ke Kabupaten Kulon Progo (2010-2012). Pada tahun 2012 pemerataan pendidikan yang terbaik tetap berada di kota Yogyakarta dengan ketimpangan pendidikan mendekati pemerataan sempurna yaitu 0,177406, diikuti dengan Kabupaten Sleman (0,211086), Gunung Kidul (0,238774), Bantul (0,246176), Kulon Progo (0,254453).

4.4. Hasil Uji Model Regresi Panel

4.4.1. Pemilihan Model Regresi

Dalam model regresi data panel memiliki 3 (tiga) macam model regresi yaitu, *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Maka dari itu perlu dilakukan uji pemilihan model agar dapat memperoleh dugaan yang efisien. Hasil uji pemilihan model sebagai berikut:

1. *Chow Test* (uji F-statistik)

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : memilih menggunakan estimasi model *common effect*.
- b. H_1 : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*.

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila *p-value* tidak signifikan ($\geq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model *Common Effect*.

Tabel 4.2.

Hasil uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: YUDHA			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.721552	(4,16)	0.0000
Cross-section Chi-square	41.121999	4	0.0000

Sumber, data diolah.

Nilai distribusi *Chi-square* dari perhitungan menggunakan *Eviews 6* adalah sebesar 41.121999 dengan probabilitas 0,000 (kurang dari 5%), sehingga H_0 ditolak dan gagal menolak H_1 , maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Uji hipotesisnya yaitu:

- a. H_0 : memilih menggunakan model estimasi *random effect*.
- b. H_1 : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*.

Untuk melakukan *uji Hausman* maka dapat melihat dari nilai *P-value*. Apabila *p-value* signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect*.

Tabel 4.3.

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: YUDHA			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66.886208	4	0.0000

Sumber, data diolah.

Nilai distribusi *Chi-square* dari perhitungan menggunakan *Eviews 6* adalah sebesar 66.886208 dengan probabilitas 0,0000 (kurang dari 5%),

sehingga H_0 ditolak dan gagal menolak H_1 , maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

3. Esimasi *Fixed Effect*

Estimasi *fixed effect* adalah teknik pengestimasiian dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep waktu yang sama. Selain itu, model ini juga dapat mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variabel dan antar waktu.

Tabel 4.4.

Hasil Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Sample: 2008 2012				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 5				
Total pool (balanced) observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.37674	5.168139	-2.201323	0.0427
LOG(X1?)	2.945585	1.345944	2.188490	0.0438
LOG(X2?)	-0.211347	0.056226	-3.758864	0.0017
LOG(X3?)	0.160094	0.053743	2.978880	0.0089
LOG(X4?)	0.047380	0.074207	0.638478	0.5322
Fixed Effects (Cross)				
_BTL—C	0.166727			
_GK—C	0.290201			
_KP—C	0.104940			
_SLM—C	-0.152647			
_YK—C	-0.409221			

Sumber, data diolah

$$\text{LOG (Y)} = -11.37674 + \text{LOG } 2.945585 \text{ (X1)} - \text{LOG } 0.211347 \text{ (X2)} + \\ \text{LOG } 0.160094 \text{ (X3)} + \text{LOG } 0.047380 \text{ (X4)} + e$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan pendidikan (satuan persen)

X1 = Indeks Pembangunan Manusia (satuan persen)

X2 = Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (satuan persen)

X3 = Ketimpangan Pendapatan (satuan persen)

X4 = Laju Pertumbuhan PDRB (satuan persen)

Tabel 4.5.

Besar Koefisien

Fixed Effects (Cross)	Costan	Intersep	Hasil
_BTL—C	-11.37674	0.16673	-11.54347
_GK—C	-11.37674	0.29020	-11.66694
_KP—C	-11.37674	0.10494	-11.48168
_SLM—C	-11.37674	-0.15264	-11.22409
_YK—C	-11.37674	-0.40922	-10.96752

sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai ketimpangan pendidikan yang dilihat dari intersep menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki ketimpangan pendidikan yang terendah sebesar -10.96752 pada saat semua variabel bernilai nol. kemudian Kabupaten Gunung Kidul memiliki ketimpangan pendidikan tertinggi sebesar -11.37674 pada saat semua variabel bernilai nol.

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Uji individu (uji t)

Tabel 4.6.

Tabel pengujian hipotesis

Variabel	t-statistik	t-hitung	Prob.	Keterangan
C	-2.201323	1.645	0.0427	Signifikan
LOG X1	2.188490	1.645	0.0438	Signifikan
LOG X2	-3.758864	1.645	0.0017	Signifikan
LOG X3	2.978880	1.645	0.0089	Signifikan
LOG X4	0.638478	1.645	0.5322	Tidak Signifikan

Sumber, data diolah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Koefisien variabel dari IPM adalah 2.945585 dan t-statistik sebesar 2.188490 sedangkan probabilitas sebesar 0.0438 .ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel IPM signifikan terhadap variabel ketimpangan pendidikan dan berpengaruh positif. Jadi apabila IPM naik sebesar 1%, maka ketimpangan pendidikan naik sebesar 2.945585 %. Itu berarti gagal menolak H_0 .

2. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Koefisien variabel dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah -0.211347 dan t-statistik sebesar -3.758864 sedangkan probabilitas sebesar 0.0017. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah signifikan terhadap variabel ketimpangan pendidikan dan berpengaruh negatif. Itu artinya, apabila belanja pemerintah naik sebesar 1 %, maka ketimpangan pendidikan turun sebesar 0,211347 %. Itu artinya gagal menolak H_0 .

3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien variabel dari ketimpangan distribusi pendapatan adalah 0.160094 dan t-statistik sebesar 2.978880 sedangkan probabilitas sebesar 0.0089. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel ketimpangan distribusi pendapatan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendidikan dan berpengaruh positif. Itu artinya apabila ketimpangan distribusi pendapatan naik sebesar 1 %, maka ketimpangan pendidikan juga naik sebesar 0.160094 %. Itu artinya gagal menolak H_0 .

4. Laju Pertumbuhan PDRB

Koefisien variabel dari laju pertumbuhan ekonomi adalah 0.047380 dan t-statistik sebesar 0.638478 sedangkan probabilitas sebesar 0.5322. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pendidikan. Karena memiliki nilai probabilitas $0.5322 \geq 5\%$ ini berarti menolak H_0 .

4.5.2. Uji parsial (uji F)

Tabel 4.7.

Hasil Uji F

R-squared	0.971170
Adjusted R-squared	0.956754
S.E. of regression	0.031522
F-statistic	67.37122
Prob(F-statistic)	0.000000

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak mempengaruhi.

F-statistik sebesar 67.37122 dengan probabilitas sebesar 0.000000 (5%), sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.5.3. Uji Determinasi (R^2)

Tabel 4.8.

Uji R^2

R-squared	0.971170
Adjusted R-squared	0.956754
S.E. of regression	0.031522
F-statistic	67.37122
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber, data diolah.

$R^2 = 0,971170$, yang artinya bahwa variasi ketimpangan pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, belanja pemerintah bidang pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan laju pertumbuhan PDRB sebesar 97,1% dan sisanya 2,9% dijelaskan oleh variabel lain.

4.6. Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

4.6.1. Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Artinya apabila nilai angka dari Indeks Pembangunan Manusia naik maka akan diikuti oleh kenaikan dari angka ketimpangan pendidikan. Ini

berarti angka variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik, tidak bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (PPP). Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan. Dengan ini IPM yang tinggi belum tentu dapat mengurangi angka ketimpangan pendidikan. Pada saat masyarakat memilih untuk sejahterakan keluarga maka pilihan yang diambil adalah dengan melakukan sebuah pekerjaan, dan bukan untuk bersekolah. Bila kita mengacu pada data yang ada dalam BPS, angka partisipasi

sekolah umur 16-18 adalah 80,22% sedangkan umur 19-24 adalah 44,32%. Dapat dikatakan minat untuk melanjutkan pendidikan pada fase SMA ke Universitas mengalami penurunan sebesar 35,9% di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Kemudian bila kita mengamati data BPS tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja tahun 2012 sebesar 413.274 jenis kelamin laki-laki merupakan angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA dan sebesar 248.411 jenis kelamin perempuan yang merupakan angkatan kerja. Ini berarti walaupun IPM mempengaruhi ketimpangan pendidikan, bukan berarti tingginya angka IPM dapat menurunkan angka ketimpangan pendidikan karena orang lebih memilih bekerja untuk mensejahterakan hidup daripada melanjutkan pendidikan.

4.6.2. Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti apabila ada kenaikan biaya untuk pendidikan akan menurunkan angka ketimpangan pendidikan. Menurut Mahmudi (2007), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu: rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan

rendahnya tingkat pendidikan. Tingginya angka ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti kemiskinan, keluarga, pengangguran dll. Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia, pendistribusi dan penstabilisasi tentang segala kebijakan mengenai pendidikan. Penyediaan dana untuk pembangunan pendidikan seperti biaya beasiswa, Biaya Oprasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung sekolah dan penyediaan tenaga pengajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa efektif dapat mengurangi ketimpangan pendidikan. Dengan kata lain, semakin besar nilai rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan dapat mempengaruhi untuk menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

4.6.3. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Pendidikan

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan ketimpangan pendidikan memiliki hubungan yang positif. Ini berarti apabila angka ketimpangan distribusi pendapatan naik maka akan diikuti dengan kenaikan angka ketimpangan pendidikan. Hasil ini tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh M.J. Bustomi Di Provinsi Jawa Tengah Yang mengatakan ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi dari ketimpangan pendidikan. Realita Di Provinsi D.I. Yogyakarta bahwa apabila pendapatan masyarakat

merata maka akan memperkecil angka ketimpangan pendidikan. Semakin kecil angka ketimpangan pendapatan berarti semakin banyak orang yang berpenghasilan sama. Itu berarti banyak anak yang dapat bersekolah dan dengan kata lain ketimpangan pendidikan pun akan menurun.

4.6.4. Analisis pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Ketimpangan Pendidikan

Hasil penelitian mengatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi dari ketimpangan pendidikan. Hal ini terjadi karena PDRB hanya melihat dari hasil produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah tersebut. Yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah PDRB mengalami peningkatan bukan dari baiknya kualitas pendidikan manusianya, namun dikarenakan banyaknya yang melakukan pekerjaan pada usia sekolah. Hal ini diperkuat dengan data BPS yang mencatat bahwa sebanyak 514.652 jiwa usia 15 tahun ke atas bekerja sebagai petani, 479.876 jiwa bekerja menjadi pedagang, dan 248.473 jiwa usia 15 tahun keatas bekerja di industry pengolahan.

Selain itu, banyaknya klaster seperti kasongan (gerabah), Manding (kulit) meningkatkan PDRB dengan produksi keajinan. Tidak mempengaruhinya laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendidikan di Yogyakarta juga dipengaruhi banyaknya sekolah informal yang mengajarkan kreatifitas

masyarakatnya dengan seni dan budaya yang masih hingga saat ini melekat pada Yogyakarta. Dengan ini meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah, yaitu dalam kisaran 0,20-0,35. Meskipun pada Kota Yogya pemerataan hampir menyeluruh pada tahun 2012 dengan angka 0,177406, diikuti dengan Kabupaten Sleman (0,211086), Gunung Kidul (0,238774), Bantul (0,246176), Kulon Progo (0,254453). Dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun tergolong ketimpangan rendah, namun Kulon Progo lah yang memiliki angka ketimpangan pendidikan yang tertinggi.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh Positif terhadap ketimpangan Pendidikan. Ini terjadi karena dalam IPM merupakan hasil perhitungan dari indikator kesehatan yang diwakili dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tahun sekolah dan kemampuan masyarakat yang diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang masing-masing akan mempengaruhi dari besarnya nilai IPM tersebut. Selain itu, IPM juga untuk mengukur seberapa jauh pembangunan manusia untuk kesejahteraan manusia

tersebut. Bila melihat paradikma sosial masyarakat yang dihantui oleh kemiskinan, pengangguran, mencari pekerjaan merupakan realita yang ada pada masyarakat Indonesia. Ini yang menyebabkan walaupun angka IPM mempengaruhi ketimpangan pendidikan tapi tidak selamanya angka IPM yang tinggi akan menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

3. Variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendidikan. Berarti naiknya biaya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan menurunkan ketimpangan pendidikan. kemiskinan, dan orang tua yang menganggur akan menyebabkan ketimpangan pendidikan tinggi. Ini yang menjadi alasan mengapa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sangat mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Bantuan seperti beasiswa, BOS, pembangunan sarana pendidikan, penambahan tenaga pengajar, peningkatan mutu pengajar sangat efektif untuk menurunkan angka ketimpangan pendidikan.
4. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan. Ini menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan dapat sangat mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Dari hasil penelitian bahwa apabila angka ketimpangan pendapatan tinggi akan mempengaruhi naiknya angka ketimpangan pendidikan.
5. Variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Ini berarti laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak

mempengaruhi angka dari ketimpangan pendidikan. Ini terjadi karena laju pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari besarnya angka produktifitas ekonomi suatu wilayah dengan melihat tingkat konsumsi, investasi, produksi barang dan jasa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan empiris yang didapat dari penelitian ini, maka saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Untuk melakukan pemerataan pembangunan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebaiknya pemerintah lebih melihat pada angka ketimpangan pendidikan agar lebih tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan tentang pendidikan.
2. Pembangunan ekonomi sebaiknya jangan melupakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Karena yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa indeks pembangunan manusia tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah pembangunan manusia telah merata. Masih adanya pandangan masyarakat tentang “mending kerja dari pada sekolah” serta masih adanya pernikahan dimasa usia sekolah merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang masih harus dicari solusinya. Kemudian belanja pemerintah untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan harus lebih ditingkatkan dan harus tepat sasaran agar segala bantuan benar-benar tersalur kepada masyarakat yang tepat.

3. Laju pertumbuhan PDRB yang baik tidak menjamin bahwa ketimpangan pendidikan akan berkurang. Ini terjadi karena pemegang modal terbesar adalah pihak swasta asing dan sedikit masyarakat yang dapat mengikutinya. Oleh karena itu perlu adanya pembagian wilayah untuk masyarakat lokal agar masyarakat lokal juga dapat merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
4. Peneliti selanjutnya yang tertarik menginvestasi ketimpangan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya meneliti hubungan ketimpangan pendidikan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia serta hubungan ketimpangan pendidikan dengan pernikahan dini dan angkatan kerja muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *D.I. Yogyakarta dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Bantul dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Yogya dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Gunung Kidul dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Sleman dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Kulon Progo dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Kulon Progo* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Survei Sosial dan Ekonomi Nasional* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Gini Ratio* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Bustomi. M. J. 2012. Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah.*Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Semarang (dipublikasikan).
- Digdowniseiso, Kumba, 2010, "Measuring gini coefficient of education: the Indonesian cases," MRPA paper, No. 19865. (<http://mprapa.ub.uni-munich.de/19865>).
- Easterly, W. (2004), *The Elusive Quest for Growth, Economist's Adventures and Misadventures in the Tropics*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Galor, O. and Moav, O. (2004), "From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and The Process of Development," *Review of Economic Studies*, 60: 35-52.
- Hojo, Masakazu, 2009, " Inequality in Japanese Education: Estimating Using the Gini Education Coefficient," *The Japanese Economy*, vol. 36, no.3, pp: 3-27.

- Kuncoro.M., 2004.*Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*.Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro.M., 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Masyithah., 2011. “Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008”.*Tesis-S2*, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Mesa, E.P., 2007, “Measuring Education Inequality in the Philippines,” *Theses*, University of the Philippines School of Economics, (<http://www.econ.upd.edu.ph/>).
- Pemerintah Republik Indonesia.1999, *Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Rahayu.A., 2003.“Ketimpangan Pendidikan Di Indonesia”.*Tesis-S2*, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Salwa Trabelsi (2013), Regional Inequality of Education in Tunisia: an Evaluation by the Gini Index , *JEL Classification: i22, i31, d63, c43*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Thomas, V., Y Wang and X. Fan, 2001, Neasuring Education Inequality: Gini Coefficient of Education,” *Policy Research Working Paper*, No:2525, World Bank Institute.
- Todaro. M., dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.
- Tomul, Ekber (2009), Measuring regional inequality of education in Turkey: an evaluation by Gini index , *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 949–952.
- Widarjono.A., 2007.*Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. FE UII.Yogyakarta.
- Widodo. A. Waridin dan Maria. K.J., 2011. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Jawa

Tengah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1. Universitas Diponegoro. Semarang (dipublikasikan).

DAFTAR PUSTAKA ELEKTRONIK

<http://www.sciedu.ca/journal/index.php/wje/article/viewFile/2138/1130>

<http://ac.els-cdn.com/S1877042809001712/>

LAMPIRAN

DATA VARIABEL

TAHUN	OBJEK	Y	X1	X2	X3	X4
2008	KP	0,259587	73,26	246511	0,289	4,71
2009	KP	0,232991	73,77	310325	0,2504	3,97
2010	KP	0,254911	74,49	270136	0,2408	3,06
2011	KP	0,248768	75,04	371294	0,3365	4,95
2012	KP	0,254453	75,33	420826	0,3429	5,01
2008	GK	0,231842	70	375962	0,2529	4,39
2009	GK	0,227992	70,18	384566	0,2389	4,14
2010	GK	0,247684	70,45	393444	0,2517	4,15
2011	GK	0,247392	70,84	429717	0,301	4,33
2012	GK	0,238774	71,11	630313	0,3234	4,84
2008	BTL	0,265943	73,38	295824	0,32	4,9
2009	BTL	0,244081	73,75	381968	0,2513	4,47
2010	BTL	0,250211	74,53	429799	0,2746	4,97
2011	BTL	0,246631	75,05	558920	0,2963	5,27
2012	BTL	0,246176	75,51	616638	0,3068	5,34
2008	SLM	0,21877	77,24	340914	0,3107	5,13
2009	SLM	0,210556	77,7	365862	0,2944	4,48
2010	SLM	0,214098	78,2	416986	0,2758	4,49
2011	SLM	0,199141	78,79	470261	0,2709	5,19
2012	SLM	0,211086	79,39	671107	0,2783	5,45
2008	YK	0,186522	78,95	246309	0,1768	5,12
2009	YK	0,172769	79,29	281331	0,2327	4,46
2010	YK	0,175029	79,52	303671	0,2174	4,98
2011	YK	0,169994	79,89	306813	0,1937	5,64
2012	YK	0,177406	80,24	339868	0,1793	5,76

Y = KETIMPANAN PENDIDIKAN

X1 = INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

X2 = BELANJA PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

X3 = KETIMPANGAN PENDAPATAN

X4 = LAJU PERTUMBUHAN PDRB

1. *Common Effect*

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/16/14 Time: 13:15

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.427360	1.999954	3.213754	0.0044
LOG(X1?)	-1.576655	0.423007	-3.727254	0.0013
LOG(X2?)	-0.031078	0.064724	-0.480161	0.6363
LOG(X3?)	0.425415	0.097286	4.372841	0.0003
LOG(X4?)	-0.094264	0.139166	-0.677351	0.5059
R-squared	0.792652	Mean dependent var	-1.499442	
Adjusted R-squared	0.751182	S.D. dependent var	0.140813	
S.E. of regression	0.070240	Akaike info criterion	-2.296953	
Sum squared resid	0.098672	Schwarz criterion	-2.053178	
Log likelihood	33.71191	Hannan-Quinn criter.	-2.229340	
F-statistic	19.11404	Durbin-Watson stat	1.135109	
Prob(F-statistic)	0.000001			

2. Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/16/14 Time: 13:18

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.37674	5.168139	-2.201323	0.0427
LOG(X1?)	2.945585	1.345944	2.188490	0.0438
LOG(X2?)	-0.211347	0.056226	-3.758864	0.0017
LOG(X3?)	0.160094	0.053743	2.978880	0.0089
LOG(X4?)	0.047380	0.074207	0.638478	0.5322
Fixed Effects				
(Cross)				
_BTL—C	0.166727			
_GK—C	0.290201			
_KP—C	0.104940			
_SLM—C	-0.152647			
_YK—C	-0.409221			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.971170	Mean dependent var	-2.171716
Adjusted R-squared	0.956754	S.D. dependent var	1.582981
S.E. of regression	0.031522	Sum squared resid	0.015898
F-statistic	67.37122	Durbin-Watson stat	2.977871
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.958380	Mean dependent var	-1.499442
Sum squared resid	0.019806	Durbin-Watson stat	2.910031

3. *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: YUDHA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.056562	(4,16)	0.0000

4. *Random Effect*

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/16/14 Time: 13:33

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.427360	0.982412	6.542426	0.0000
LOG(X1?)	-1.576655	0.207788	-7.587787	0.0000
LOG(X2?)	-0.031078	0.031793	-0.977491	0.3400
LOG(X3?)	0.425415	0.047788	8.902046	0.0000
LOG(X4?)	-0.094264	0.068361	-1.378922	0.1831
Random Effects				
(Cross)				
_BTL—C	5.04E-10			
_GK—C	-4.02E-10			
_KP—C	2.92E-10			
_SLM—C	-1.76E-10			
_YK—C	-2.19E-10			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.33E-06	0.0000
Idiosyncratic random			0.034503	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.792652	Mean dependent var	-1.499442	
Adjusted R-squared	0.751182	S.D. dependent var	0.140813	
S.E. of regression	0.070240	Sum squared resid	0.098672	
F-statistic	19.11404	Durbin-Watson stat	1.135109	
Prob(F-statistic)	0.000001			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.792652	Mean dependent var	-1.499442	
Sum squared resid	0.098672	Durbin-Watson stat	1.135109	

5. *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: YUDHA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66.886208	4	0.0000

Kategori Tingkat Sekolah

Kategori tingkat sekolah	Tahun
Tidak sekolah/Tidak tamat SD (y1)	0+3=3
Tamat SD (y2)	6
Tamat SMP (y3)	9
Tamat SMA (y4)	12
Tamat D1,D2,D3 (y5)	14
Tamat S1,S2 (y6)	16

Sumber, data diolah yudha

Rata-rata Tahun Pendidikan DIY

KABUPATEN/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon progo	7,8	7,89	8,2	8,37	8,37
Bantul	8,55	8,64	8,82	8,92	8,95
Gunung Kidul	7,6	7,61	7,65	7,7	7,7
Sleman	10,1	10,18	10,3	10,51	10,52
Kota Yogyakarta	11,42	11,48	11,48	11,52	11,56

Sumber, BPS

MENCARI P1-P6

2008_KP	PJP	HSL	2009_KP	PJP	HSL	2010_KP	PJP	HSL	2011_KP	PJP	HSL	2012_KP	PJP	HSL
P1	24,77	0,247725	P1	14,85	0,1485	P1	21,71	0,2171	P1	18,24	0,1824	P1	23,69	0,236924
P2	29,4	0,294029	P2	36,65	0,3665	P2	28,41	0,2841	P2	21,05	0,2105	P2	23,9	0,239024
P3	19,4	0,194019	P3	21,64	0,2164	P3	19,32	0,1932	P3	23,97	0,2397	P3	19,94	0,19942
P4	21,86	0,218622	P4	22,48	0,2248	P4	23,76	0,2376	P4	29,55	0,2955	P4	26,57	0,265727
P5	1,96	0,019602	P5	2,52	0,0252	P5	3,33	0,0333	P5	2,55	0,0255	P5	2,23	0,022302
P6	2,6	0,026003	P6	1,86	0,0186	P6	3,47	0,0347	P6	4,64	0,0464	P6	3,66	0,036604
	99,99			100			100			100			99,99	
2008_BTL	PJP	HSL	2009_BTL	PJP	HSL	2010_BTL	PJP	HSL	2011_BTL	PJP	HSL	2012_BTL	PJP	HSL
P1	25,09	0,250925	P1	17,58	0,1758	P1	19,75	0,1975	P1	20,78	0,2078	P1	22,52	0,225223
P2	23,59	0,235924	P2	23,17	0,2317	P2	24,34	0,2434	P2	17,81	0,1781	P2	18,26	0,182618
P3	17,45	0,174517	P3	21,28	0,2128	P3	18,75	0,1875	P3	20,51	0,2051	P3	20,24	0,20242
P4	24,06	0,240624	P4	29,81	0,2981	P4	27,34	0,2734	P4	31,85	0,3185	P4	30,87	0,308731
P5	3,86	0,038604	P5	3,25	0,0325	P5	3,74	0,0374	P5	3,47	0,0347	P5	3,22	0,032203
P6	5,94	0,059406	P6	4,91	0,0491	P6	6,08	0,0608	P6	5,58	0,0558	P6	4,88	0,048805
	99,99			100			100			100			99,99	
2008_GK	PJP	HSL	2009_GK	PJP	HSL	2010_GK	PJP	HSL	2011_GK	PJP	HSL	2012_GK	PJP	HSL
P1	36,56	0,365563	P1	18,99	0,1899	P1	30,34	0,3034	P1	28,33	0,2833	P1	31,19	0,3119
P2	31,93	0,319268	P2	39,54	0,3954	P2	31,12	0,3112	P2	27,13	0,2713	P2	29,17	0,2917
P3	18,03	0,180282	P3	24,09	0,2409	P3	20,21	0,2021	P3	26,29	0,2629	P3	23,79	0,2379
P4	11,16	0,111589	P4	13,49	0,1349	P4	14,92	0,1492	P4	14,79	0,1479	P4	13,4	0,134
P5	1,16	0,011599	P5	1,86	0,0186	P5	1,62	0,0162	P5	1,4	0,014	P5	0,98	0,0098
P6	1,17	0,011699	P6	2,03	0,0203	P6	1,79	0,0179	P6	2,06	0,0206	P6	1,47	0,0147
	100,01			100			100			100			100	
2008_SLM	PJP	HSL	2009_SLM	PJP	HSL	2010_SLM	PJP	HSL	2011_SLM	PJP	HSL	2012_SLM	PJP	HSL
P1	17,11	0,171117	P1	11,53	0,1153	P1	14,02	0,140214	P1	12,04	0,1204	P1	16,08	0,1608
P2	16,56	0,165617	P2	19,23	0,1923	P2	19,72	0,19722	P2	12,44	0,1244	P2	15,24	0,1524

P3	16,44	0,164416	P3	16,93	0,1693	P3	15,73	0,157316	P3	17,09	0,1709	P3	16,04	0,1604
P4	37,42	0,374237	P4	37,08	0,3708	P4	36,42	0,364236	P4	41,18	0,4118	P4	38,45	0,3845
P5	4,54	0,045405	P5	4,48	0,0448	P5	4,06	0,040604	P5	5,56	0,0556	P5	4,25	0,0425
P6	7,92	0,079208	P6	10,75	0,1075	P6	10,04	0,10041	P6	11,69	0,1169	P6	9,94	0,0994
	99,99			100			99,99			100			100	
2008_YK	PJP	HSL	2009_YK	PJP	HSL	2010_YK	PJP	HSL	2011_YK	PJP	HSL	2012_YK	PJP	HSL
P1	11,66	0,1166	P1	6,18	0,0618	P1	8,97	0,089709	P1	7,46	0,0746	P1	9,91	0,09911
P2	14,96	0,1496	P2	18,29	0,1829	P2	15,34	0,153415	P2	12,01	0,1201	P2	12,26	0,122612
P3	16,1	0,161	P3	17,65	0,1765	P3	17,99	0,179918	P3	17,25	0,1725	P3	16,81	0,168117
P4	39,3	0,393	P4	39,39	0,3939	P4	40,97	0,409741	P4	42,08	0,4208	P4	41,47	0,414741
P5	6,32	0,0632	P5	5,76	0,0576	P5	5,35	0,053505	P5	6,58	0,0658	P5	5,79	0,057906
P6	11,66	0,1166	P6	12,73	0,1273	P6	11,37	0,113711	P6	14,62	0,1462	P6	13,75	0,137514
	100			100			99,99			100			99,99	

Setelah ditemukan P1-P6 maka masukan dalam rumus Gini sebagai berikut

$$E = \frac{1}{\mu} [p_2(y_2 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_2)p_2 + p_4(y_4 - y_1)p_1 + p_4(y_4 - y_2)p_2 + p_4(y_4 - y_3)p_3 + p_5(y_5 - y_1)p_1 + p_5(y_5 - y_2)p_2 + p_5(y_5 - y_3)p_3 + p_5(y_5 - y_4)p_4 + p_6(y_6 - y_1)p_1 + p_6(y_6 - y_2)p_2 + p_6(y_6 - y_3)p_3 + p_6(y_6 - y_4)p_4 + p_6(y_6 - y_5)p_5]$$

keterangan:

E_{GI} = ketimpangan pendidikan

μ = rata-rata tahun pendidikan

$p_i - p_j$ = proporsi populasi tingkat pencapaian sekolah yang pasti

$y_i - y_j$ = tahun sekolah pada tingkat pencapaian yang berbeda

n = jumlah kategori tingkat pencapaian sekolah